



STRATEGI HUMAS KORBRIMOB POLRI DI ERA DIGITAL

Fadhil Indrawan
Umaimah Wahid

Strategi Humas Korbrimob Polri Di Era Digital

Penulis:

Fadhil Indrawan
Umaimah Wahid



Strategi Humas Korbrimob Polri Di Era Digital

Copyright © PT Penamuda Media, 2026

Penulis:

Fadhil Indrawan
Umaimah Wahid

ISBN: 978-634-2830-01-7

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: @penamudamedia

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2026

viii +157 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku Strategi Humas Korbrimob Polri di Era Digital dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan mendasar dalam cara institusi negara berkomunikasi dengan publik, termasuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri, sebagai satuan elite yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dituntut tidak hanya profesional dalam tugas operasional, tetapi juga adaptif, terbuka, dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat dan tidak lagi sepenuhnya dapat dikendalikan oleh satu sumber. Media sosial, platform digital, serta jurnalisme warga menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi fungsi kehumasan. Di satu sisi, kesalahan informasi, hoaks, dan framing negatif dapat dengan mudah memengaruhi opini publik. Di sisi lain, teknologi digital membuka ruang besar bagi Humas Korbrimob Polri untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi humas yang terencana, terukur, dan berbasis pemahaman terhadap karakter media digital serta perilaku masyarakat modern.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran utuh mengenai strategi kehumasan Korbrimob Polri di era

digital, mulai dari konteks dan tantangan komunikasi, struktur dan mekanisme kerja humas, strategi komunikasi publik, pemanfaatan media sosial, penguatan sumber daya manusia, hingga arah pengembangan kehumasan di masa depan. Setiap bab dirancang untuk saling melengkapi, sehingga pembaca dapat memahami humas tidak sekadar sebagai fungsi penyampai informasi, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membangun citra, reputasi, dan legitimasi institusi.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi dan bahan refleksi bagi personel Polri, praktisi humas, akademisi, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap komunikasi publik dan tata kelola institusi keamanan di era digital. Semoga kehadiran buku ini memberikan kontribusi positif bagi penguatan peran Humas Korbrimob Polri dalam mewujudkan komunikasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik..

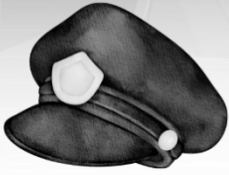
Januari 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1. Konteks Kehumasan Korbrimob Polri di Era Digital	1
A. Urgensi Transformasi Humas	1
B. Peran Strategis Korbrimob dalam Komunikasi Publik	5
C. Tantangan Komunikasi di Lingkungan Kepolisian	10
D. Dinamika Publik, Media, dan Keamanan Nasional	14
Bab 2. Transformasi Digital dan Implikasinya bagi Humas Polri	22
A. Perubahan Lanskap Media dan Informasi	22
B. Teknologi Digital dalam Operasional Kehumasan	26
C. Pengaruh Algoritma, Platform Media Sosial, dan Data Publik	29
D. Risiko Disinformasi dan Info Hoaks terhadap Kinerja Humas	34
Bab 3. Struktur, Fungsi, dan Mekanisme Kerja Humas Korbrimob	39
A. Organisasi Humas Korbrimob	39
B. Alur Komunikasi Internal dan Eksternal	45
C. Koordinasi antar-Satker dan Stakeholder	48
D. Penentuan Prioritas Isu dan Respons Cepat	52
Bab 4. Strategi Komunikasi Publik Korbrimob di Era Digital	56
A. Pendekatan Proaktif dan Preventif dalam Komunikasi	56
B. Strategi Narasi Positif dan Framing Informasi	60
C. Penguatan Trust Building dengan Masyarakat	64
D. Manajemen Krisis dan Komunikasi Darurat	72
Bab 5. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Kanal Komunikasi Resmi	80

A. Optimalisasi Platform (Instagram, YouTube, TikTok, Website)	80
B. Pedoman Konten, Etika, dan Keamanan Informasi	86
C. Teknik Storytelling Digital untuk Institusi Keamanan	91
D. Monitoring, Analitik Media Sosial, dan Evaluasi Dampak.....	94
Bab 6. Literasi Digital dan Kesiapan Sumber Daya Manusia	101
A. Kompetensi Digital yang Diperlukan bagi Personel Humas	101
B. Pelatihan, Penguatan Kapasitas, dan Adaptasi Teknologi	105
C. Kepemimpinan Komunikasi di Era Digital	109
D. Pengembangan Modul Pelatihan Humas Modern	113
Bab 7. Kolaborasi Publik, Media, dan Komunitas di Era Digital	117
A. Kemitraan Strategis dengan Media Arus Utama .	117
B. Kolaborasi dengan Influencer, Akademisi, dan Komunitas	120
C. Segmentasi Audiens dan Pendekatan Komunikasi Targeted	123
D. Penguatan Citra dan Reputasi Institusi melalui Engagement Publik.....	127
Bab 8. Agenda Pengembangan Strategis Humas Korbrimob ke Depan	133
A. Inovasi Teknologi Masa Depan (AI, Big Data, VR/AR).....	133
B. Model Komunikasi Dua Arah yang Lebih Adaptif	139
C. Sistem Evaluasi Kinerja Humas Berbasis Indikator Digital	139
Referensi	148
Tentang Penulis	154



Bab 1. Konteks Kehumasan Korbrimob Polri di Era Digital

A. Urgensi Transformasi Humas

Transformasi humas merupakan keniscayaan bagi institusi kepolisian di tengah perubahan radikal ekosistem komunikasi publik pada era digital. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola komunikasi dari model satu arah yang hierarkis menuju komunikasi dua arah yang terbuka, cepat, dan partisipatif. Dalam konteks Korbrimob Polri, perubahan ini menuntut humas untuk tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi kegiatan institusi, tetapi sebagai pengelola makna, persepsi, dan kepercayaan publik. Publik saat ini tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi, menyebarkan, dan menilai ulang informasi secara mandiri melalui berbagai platform digital, sehingga humas harus mampu hadir secara aktif, adaptif, dan strategis dalam ruang tersebut.

Urgensi transformasi humas semakin menguat ketika komunikasi publik institusi keamanan berada dalam sorotan yang tinggi. Setiap tindakan, pernyataan, maupun kebijakan Korbrimob Polri berpotensi menjadi isu publik yang cepat menyebar dan ditafsirkan secara beragam di media sosial. Dalam situasi seperti ini, humas memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam membangun narasi institusional yang akurat, proporsional, dan berimbang. Ketidaksiapan humas dalam merespons dinamika digital dapat menimbulkan kesenjangan informasi, memicu spekulasi, serta memperkuat persepsi negatif yang sulit dikoreksi setelah terlanjur viral.

Selain itu, transformasi humas juga berkaitan erat dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat digital semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap keterbukaan informasi, kejelasan sikap, serta konsistensi komunikasi dari aparat negara. Humas Korbrimob Polri dituntut untuk mampu menjelaskan kebijakan, tindakan operasional, dan peran strategis institusi secara komunikatif dan mudah dipahami, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan negara. Dengan demikian,

transformasi humas bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam membangun relasi yang setara dan dialogis dengan masyarakat.

Urgensi ini semakin nyata ketika dihadapkan pada fenomena disinformasi dan hoaks yang kerap memanfaatkan isu keamanan dan penegakan hukum sebagai komoditas perhatian publik. Informasi yang keliru, dipelintir, atau sengaja dimanipulasi dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi institusi. Dalam kondisi tersebut, humas yang belum bertransformasi akan selalu berada pada posisi reaktif dan defensif. Sebaliknya, humas yang telah beradaptasi secara digital mampu melakukan komunikasi proaktif, membangun agenda informasi, serta mencegah eskalasi krisis melalui kehadiran yang konsisten dan kredibel di ruang publik digital (Wardle & Derakhshan, 2017).

Transformasi humas juga penting untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Korbrimob Polri. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kinerja operasional di lapangan, tetapi juga melalui bagaimana institusi tersebut berkomunikasi, mendengarkan, dan merespons aspirasi masyarakat. Komunikasi yang

tertutup, kaku, dan lambat akan memperlemah legitimasi institusi, sementara komunikasi yang terbuka, empatik, dan berbasis data akan memperkuat citra profesional dan humanis. Oleh karena itu, humas perlu bertransformasi menjadi fungsi strategis yang terintegrasi dengan kebijakan institusi secara menyeluruh.

Dari perspektif internal organisasi, transformasi humas juga berperan dalam memperkuat koordinasi, konsistensi pesan, dan disiplin komunikasi di lingkungan Korbrimob Polri. Di era digital, pernyataan individu dapat dengan mudah diasosiasikan sebagai representasi institusi. Hal ini menuntut adanya sistem komunikasi internal yang kuat, pedoman yang jelas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia humas agar mampu mengelola informasi secara profesional dan bertanggung jawab. Transformasi humas dengan demikian menjadi instrumen penting dalam menjaga kesatuan narasi dan mencegah distorsi pesan di ruang publik.

Urgensi transformasi humas semakin relevan ketika Korbrimob Polri dihadapkan pada situasi krisis, baik yang bersifat operasional, sosial, maupun politik. Krisis tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang digital, tempat opini publik dibentuk dan

dipertarungkan. Humas yang adaptif dan terlatih secara digital mampu mengelola komunikasi krisis secara cepat, terukur, dan berbasis empati, sehingga dapat meredam ketegangan dan menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat (Lamberti, 2016).

Transformasi ini tidak hanya mencakup pemanfaatan media sosial dan teknologi digital, tetapi juga perubahan cara berpikir, budaya organisasi, serta kepemimpinan komunikasi. Dengan humas yang bertransformasi secara menyeluruh, Korbrimob Polri dapat membangun komunikasi publik yang lebih adaptif, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sejalan dengan tuntutan era digital dan prinsip tata kelola institusi yang modern.

B. Peran Strategis Korbrimob dalam Komunikasi Publik

Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur keamanan nasional, sehingga setiap aktivitas, kebijakan, dan tindakan operasionalnya secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi perhatian publik. Dalam era digital, perhatian tersebut tidak hanya muncul melalui media arus utama, tetapi juga berkembang pesat di media sosial dan ruang digital lainnya. Oleh

karena itu, peran Korbrimob dalam komunikasi publik tidak dapat dilepaskan dari fungsi kehumasan yang terencana, profesional, dan adaptif terhadap dinamika opini publik yang terus berubah.

1. Korbrimob sebagai Representasi Institusi Polri di Ruang Publik

Sebagai satuan elit Polri yang kerap terlibat dalam operasi berisiko tinggi, Korbrimob sering kali dipersepsikan sebagai wajah negara dalam situasi krisis dan pengamanan. Persepsi publik terhadap Korbrimob tidak hanya dibentuk oleh keberhasilan operasional, tetapi juga oleh bagaimana institusi ini menjelaskan peran, tujuan, dan batas kewenangannya kepada masyarakat. Komunikasi publik yang jelas dan proporsional menjadi kunci untuk memastikan bahwa tindakan Korbrimob dipahami sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai ancaman terhadap masyarakat (Kurniawan & Siregar, 2019).

2. Pengelolaan Narasi Keamanan dan Ketertiban

Korbrimob memiliki peran strategis dalam membangun narasi keamanan yang menenangkan, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks digital, narasi keamanan yang tidak dikelola

dengan baik dapat dengan mudah dipelintir menjadi isu negatif atau disinformasi. Melalui komunikasi publik yang terstruktur, Korbrimob dapat mengarahkan wacana publik agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, sekaligus mencegah eskalasi ketakutan atau kepanikan di masyarakat akibat informasi yang tidak akurat.

3. Komunikasi dalam Situasi Krisis dan Kontinjensi

Dalam situasi krisis, seperti gangguan keamanan atau operasi berskala besar, Korbrimob berada pada posisi sentral yang menuntut kecepatan dan ketepatan komunikasi. Peran strategis Korbrimob dalam komunikasi publik terletak pada kemampuannya menyampaikan informasi yang faktual, terkini, dan terkoordinasi dengan satuan lain, sehingga publik tidak terjebak pada spekulasi. Komunikasi krisis yang efektif dapat mengurangi tekanan publik, menjaga legitimasi institusi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan (Lamberti, 2016).

4. Penguatan Kepercayaan Publik melalui Transparansi Terukur

Kepercayaan publik terhadap Korbrimob tidak dapat dibangun hanya melalui kinerja operasional, tetapi juga melalui transparansi komunikasi yang terukur. Dalam hal ini, Korbrimob berperan strategis dalam menunjukkan keterbukaan informasi tanpa mengorbankan aspek keamanan. Transparansi yang dikelola secara profesional oleh humas memungkinkan publik memahami proses pengambilan keputusan dan logika tindakan institusi, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya dan legitimasi sosial.

5. Kolaborasi dengan Media dan Pemangku Kepentingan

Peran strategis Korbrimob dalam komunikasi publik juga tercermin dari kemampuannya membangun hubungan yang konstruktif dengan media massa dan pemangku kepentingan lainnya. Media merupakan mitra penting dalam menyampaikan pesan institusi secara luas dan berimbang. Melalui kolaborasi yang profesional, Korbrimob dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya cepat, tetapi juga kontekstual dan bertanggung

jawab, sehingga citra institusi tetap terjaga di tengah kompetisi informasi digital.

6. Adaptasi terhadap Media Sosial sebagai Ruang Interaksi Publik

Media sosial telah menjadi ruang interaksi utama antara institusi keamanan dan masyarakat. Korbrimob memiliki peran strategis dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah yang edukatif dan persuasif. Kehadiran aktif di media sosial memungkinkan Korbrimob untuk menyampaikan klarifikasi, memberikan edukasi keamanan, serta merespons aspirasi publik secara langsung, sehingga memperkuat engagement dan kedekatan institusi dengan masyarakat (Walsh, 2019).

7. Peran Edukatif dalam Membangun Literasi Keamanan Publik

Selain menyampaikan informasi operasional, Korbrimob juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait isu keamanan dan ketertiban. Melalui komunikasi publik yang terarah, Korbrimob dapat meningkatkan literasi keamanan masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam menjaga stabilitas, serta meminimalkan kesalahpahaman

terhadap tugas dan fungsi aparat. Peran edukatif ini menjadi semakin penting di era digital, ketika informasi keamanan sering kali disederhanakan atau disalahartikan (Nweke, 2023).

8. Menjaga Konsistensi Citra dan Reputasi Institusi

Komunikasi yang terencana, konsisten, dan berbasis nilai profesionalisme akan memperkuat identitas Korbrimob sebagai satuan yang tegas, humanis, dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, konsistensi komunikasi ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kepercayaan publik dan efektivitas pelaksanaan tugas Korbrimob Polri di era digital.

C. Tantangan Komunikasi di Lingkungan Kepolisian

Komunikasi publik di lingkungan kepolisian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan organisasi sipil pada umumnya. Kepolisian beroperasi dalam konteks kewenangan negara, penegakan hukum, serta situasi yang sering kali sensitif dan berisiko tinggi. Dalam era digital, kompleksitas tersebut semakin meningkat karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, melampaui batas kontrol institusi. Oleh karena itu, tantangan komunikasi di lingkungan kepolisian tidak

hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, kultural, dan strategis, yang menuntut pengelolaan komunikasi publik secara cermat dan profesional.

1. Keterbatasan Transparansi akibat Pertimbangan Keamanan

Salah satu tantangan utama komunikasi di lingkungan kepolisian adalah adanya batasan transparansi yang disebabkan oleh pertimbangan keamanan dan kerahasiaan operasional. Tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik secara terbuka, terutama yang berkaitan dengan strategi pengamanan, intelijen, atau proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kondisi ini sering kali menimbulkan kesenjangan informasi yang dapat memicu spekulasi publik apabila tidak dikelola dengan narasi yang tepat dan komunikatif.

2. Kecepatan Arus Informasi di Era Digital

Perkembangan media sosial dan platform digital menghadirkan tantangan serius terkait kecepatan arus informasi. Informasi mengenai suatu peristiwa kepolisian dapat tersebar luas dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan. Dalam situasi ini, kepolisian sering kali berada pada posisi tertinggal, sehingga respons yang lambat berpotensi memperburuk

Referensi

- Aarts, K., & Van der Meer, T. (2021). Public trust and crisis communication in public institutions. *Public Relations Review*, 47(4), 102–118.
- Ahmed, W., Vidal-Alaball, J., Downing, J., & Seguí, F. (2020). COVID-19 and the 5G conspiracy theory: Social network analysis of Twitter data. *Journal of Medical Internet Research*, 22(5), e19458.
- Andriyanto, T. (2021). Crisis communication management in law enforcement institutions: A case study approach. *Jurnal Komunikasi & Manajemen*. DOI/URL tidak tersedia.
- Anwar, M., & Pratama, R. (2023). Digital public relations in Indonesian public institutions. *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, 8(2), 145–162.
- Austin, L., Jin, Y., & Liu, B. F. (2021). Social media and crisis communication: Explicating ethical and trust dimensions. *Journal of Public Relations Research*, 33(2), 75–93.
- Bakker, P., & Pantti, M. (2020). Media accountability and police legitimacy in digital environments. *Journalism Studies*, 21(12), 1688–1705.
- Boin, A., Hart, P. 't, Stern, E., & Sundelius, B. (2021). *The politics of crisis management* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Brooks, D. J., & McCormack, S. (2022). Police communication strategies in the age of social media. *Policing and Society*, 32(6), 735–751.
- Castells, M. (2021). *Power of communication* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Coombs, W. T. (2021). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (5th ed.). SAGE Publications.

- Djalante, R., & Lassa, J. (2022). Crisis governance and public communication in Southeast Asia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 70, 102–115.
- Dwyer, M. (2020). Reimagining police engagement? Kenya National Police Service on social media. *Policing and Society*, 30(7), 760–776.
- Effendy, O. U., & Mulyana, D. (2020). Komunikasi strategis organisasi publik. Remaja Rosdakarya.
- Fawzi, N. (2023). Digital media and public sector trust-building. *Media and Communication*, 11(1), 45–57.
- Frandsen, F., & Johansen, W. (2020). Crisis communication: Complexity, ethics, and legitimacy. *Corporate Communications*, 25(3), 567–583.
- Gálik, M., & Štefančík, R. (2021). Public institutions and digital reputation management. *Central European Journal of Communication*, 14(2), 203–220.
- Herlydinata, M. D. (2025). Toward digital community policing: Opportunities and barriers for social media engagement in Indonesia. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 72–86.
- Hermawan, H., & Nugroho, Y. (2022). Institutional communication and digital governance in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 33–49.
- Jin, Y., Pang, A., & Cameron, G. T. (2021). Toward a publics-driven crisis communication model. *Public Relations Review*, 47(1), 101–113.
- Jones, M., Ralph, L., Millie, A., & Rowe, M. (2025). Policing and social media: Exploring police digital visibility. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958251338572>
- Kadiv Humas Polri: Optimalisasi komunikasi publik era digital (2021). Tribrata News Jateng.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia – DIVHUMAS. (2021). Pedoman Humas Polri dalam Pengelolaan Media Sosial dan Informasi Publik. DIVHUMAS Polri.
- Kominfo Republik Indonesia. (2020). Pedoman komunikasi publik pemerintah di era digital.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika of Indonesia.
- Kriyantono, R. (2020). Public relations dan krisis di era digital. Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A., & Siregar, S. (2019). Community policing and public trust in Indonesia. *Journal of Asian Policing Studies*, 7(3), 211–230.
- Lamberti, R. (2016). Police use of social media during a crisis. *Journal of Professional Communication*. <https://doi.org/10.15173/jpc.v5i1.2605>
- Lee, S. T., & Li, J.-Y. Q. (2021). Social media and crisis management: A global perspective. *Public Relations Review*, 47(3), 101–129.
- Liu, B. F., Austin, L., & Jin, Y. (2020). How publics respond to crisis communication strategies. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 28(1), 34–45.
- Madianou, M. (2020). Technological mediation and trust in crisis contexts. *New Media & Society*, 22(7), 121–139.
- Martadireja, S. (2024). The effectiveness of Instagram in improving police image: A case study. *International Conference on Communication and Media Digital Proceedings*, 1, 55–68.
- Maulana, A., & Suryadi, K. (2024). Transformasi humas Polri dalam ekosistem digital. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 1–18.
- Meijer, A., & Torenvlied, R. (2021). Transparency, trust, and policing in digital societies. *Public Administration Review*, 81(4), 689–701.
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2019). Governing the digital public sphere: transparency, accountability and policing. *Government Information Quarterly*, 36(2), 101–112.
- Mulyana, D. (2021). Ilmu komunikasi: Suatu pengantar kontemporer. Remaja Rosdakarya.

- Nielsen, R. K., & Graves, L. (2017). *The future of journalism: Risks and opportunities in the digital era*. Oxford University Press.
- Noor, N. (2024). Social-media-based crisis communication: Assessing crisis communication via Twitter. *International Journal of Crisis Communication*.
<https://doi.org/10.1016/j.soccom.2024.03.005>
- Nweke, O. C. (2023). *Impact and potential of social media in policing and law enforcement*. Hill Publisher.
<https://doi.org/10.4236/blr.2023.144097>
- Pang, A., & Ng, J. (2022). Social media, institutional trust, and crisis legitimacy. *Journal of Communication Management*, 26(4), 450–468.
- Pemanfaatan Media Sosial oleh Humas Polri untuk Edukasi dan Informasi Publik (2025). PID POLDA KEPRI.
- Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. (n.d.). Emerald Group Publishing.
- Polri. (2024). Pelatihan publikasi media sosial oleh Humas Polri. *Tribratanews Metro Jaya*.
- Polri. (2025). *Rakernis Humas Polri 2025: Transformasi digital dan peningkatan kepercayaan publik*. *Tribratanews Jatim*.
- Prastowo, A., & Ramadhan, M. (2023). Strategi framing komunikasi pemerintah di media sosial. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 88–105.
- Purnawansyah, P. (2025). A comparative study of public opinion on Indonesian police using sentiment analysis. *Indonesian Journal of Data & Social Analysis*, 3(1), 22–41.
- Puspitasari, R., & Wijaya, H. (2020). Media relations and transparency in police public information. *Jurnal Humas dan Pemerintahan*, 5(1), 33–50.
- Putri, K. Y. S. (2023). Applying social media in crisis communication: A review and implications. *The*

- Messenger: Journal of Communication Studies, 10(2), 87–104. .
- Rahayu, F. S., Yapasaputri, J. P., & Sihombing, R. (2024). Strategi Humas Mabes Polri: Meningkatkan kepercayaan publik melalui media massa. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(7), 117–124.
- Raupp, J. (2021). Crisis communication and public sector legitimacy. *Public Relations Inquiry*, 10(3), 259–276.
- Romli, A. S. M. (2020). Manajemen media dan komunikasi publik digital. Nuansa Cendekia.
- Sani, A. (2022). Police as communicators to prevent COVID-19 misinformation. *Jurnal Kehumasan & Kebijakan Publik*, 8(2), 101–120.
- Sari, D. P., & Lestari, P. (2024). Manajemen isu dan krisis digital di institusi negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 28(1), 67–84.
- Schultz, F., Utz, S., & Göritz, A. (2021). Is the medium the message? Social media during crises. *Journal of Public Relations Research*, 33(1), 1–17.
- Setiadi, A., & Wibowo, T. (2022). Public trust and digital governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 201–218.
- Silalahi, U. (2020). Metode penelitian sosial kuantitatif dan kualitatif. Refika Aditama.
- Siswanto, B. (2023). Komunikasi strategis aparat keamanan di era disrupsi digital. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 13(2), 155–172.
- Sudama, I. N. (2020). “Fake news” and policing: A creativity diagram approach. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 120–137.
- Suspaningrum, D. (2024). Assessing the Indonesian National Police crisis communication strategies. *Channel: Journal of Communication*, 12(3), 134–156.
- Verhoeven, P., Tench, R., Zerfass, A., & Moreno, A. (2021). Strategic communication in public organizations. Routledge.

- Vos, M., & Schoemaker, H. (2021). Monitoring public opinion and media dynamics. Boom Publishers.
- Vos, T. P., & Finneman, J. (2018). Police–media relations in networked communication. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 12(4), 332–346.
- Walby, K. (2021). The visual politics of public police Instagram use in Canada. *Journal of Digital Media & Policy*.
- Walsh, J. P. (2019). Social media and policing: A review of recent research. *Sociology Compass*.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework. UNESCO/Council of Europe.
- Wibowo, A., & Hartono, D. (2025). Digital reputation management of law enforcement agencies. *Asian Journal of Communication*, 35(1), 90–108.

Tentang Penulis



Fadhil Indrawan lahir di Jakarta 13 September 1998, adalah seorang Anggota Kepolisian khususnya di kesatuan Korps Brimob Polri,

Fadhil menempuh pendidikan pertamanya di Program Studi Ilmu Komunikasi Public Relations, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dilanjut Pendidikan S2 di Universitas Budi Luhur dengan program Studi yang sama.

Ini adalah Karya pertamanya berupa Buku berjudul *Starategi Humas Korp Brimob Polri Di Era Digital*.

Kebiasaan tersebut menumbuhkan minatnya pada dunia kepenulisan, Buku ini lahir sebagai bentuk komitmen nya untuk berbagi pengalaman, Ia percaya bahwa menulis adalah cara sederhana namun kuat untuk menyampaikan gagasan dan menginspirasi orang lain.



**Prof. Dr. Umaimah Wahid,
M.Sc.**

Fokus pada Komunikasi Politik, Ruang Publik Digital, Kontra Hegemoni, dan Studi Wanita. Mengajar di Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur. Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi MIKOM Universitas Budi Luhur. Aktif menulis dan melakukan penelitian seperti Representasi Perempuan di DPR RI, Studi Tindakan Afirmatif, pada tahun 2009 dan 2010, Artikel di jurnal seperti Jurnal Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Universitas Yogyakarta (2012 & 2019), Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Teknologi Malaka pada tahun 2012, 2013, 2018, Jurnal Komunikasi Malaysia, JIK Universitas Padjadjaran (2018).

Menulis buku Risalah tentang Politik Perempuan: Media Massa dan Kontra Hegemoni, Gerakan Hegemoni (2014), Kekuatan Perempuan dan Politik (2014), Media Massa dan Gerakan Kontra Hegemoni: Politik Perempuan Lokal (2015), Mempertahankan Masyarakat Aceh Melalui Meunasah (2014), dan Komunikasi Politik: Teori, Konsep dan Aplikasi di Era Media Baru (edisi revisi, 2016). Berpartisipasi dalam beberapa seminar dan konferensi internasional seperti ADIC Malaysia, AMIC Malaysia, ABESS 2017 Krabi Thailand, CSSR 2017-2018 Melaka, BECIC, Patsinulok Thailand 2018, SYSSARM 2015, CISSMR, Maladewa 2019. Memperoleh Sertifikasi di Bidang Hubungan Masyarakat, Tim Desain KKNi dan Auditor Komunikasi SKKNI untuk Departemen Komunikasi dan Informasi 2015-2017. Manajemen dan Asisten untuk Program Organisasi Komunitas Wanita

FORKOMNAS KPPPA 2017-2019 (Semarang, Bogor, Medan dan Tangerang), Manajemen ICMI 2012-2016, Manajemen Asosiasi Dosen Indonesia (2012-2017), Taman Iskandar Muda (TIM), 2022-2027. Salah satu Ketua PP Perempuan Muslimat Al Washliyah 2021-2026, Presidium BMIWI Indonesia 2023-2028, Pengurus Majelis Tradisional Aceh 2023-2028, & Pengurus Aceh Global Diaspora 2023-2028. Ketua Petani Suhanah Women and Youth Center (SWYC) dan Gugus Tugas PPKS Universitas Budi Luhur (2022-2024).

Artikel yang diterbitkan di SEARCH Journal of Media and Communication Research: Pandemic politics and communication crisis How social media buzzers impaired the lockdown aspiration in Indonesia (2021), Communicative discourses and ideological practices in Indonesia's digital political spheres (2025).

STRATEGI HUMAS KORBRIMOB POLRI DI ERA DIGITAL

Buku Strategi Humas Korbrimob Polri di Era Digital menghadirkan uraian komprehensif tentang bagaimana fungsi kehumasan di lingkungan Korps Brimob Polri bertransformasi mengikuti dinamika teknologi, perilaku publik, dan tuntutan transparansi informasi di era modern. Melalui pembahasan mengenai struktur organisasi, strategi komunikasi publik, pemanfaatan media sosial, literasi digital personel, hingga manajemen isu dan krisis, buku ini menunjukkan bagaimana Humas Korbrimob dapat membangun narasi positif, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjaga citra institusi di tengah tantangan disinformasi dan percepatan arus informasi digital. Dengan menyoroti kolaborasi media, inovasi teknologi, serta peta jalan transformasi jangka panjang, buku ini menjadi rujukan praktis bagi personel kepolisian, akademisi, dan praktisi komunikasi yang ingin memahami pendekatan strategis dalam mengoptimalkan peran Humas Korbrimob Polri di era digital.

